

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH BERSAMA BPK RI
GELAR EXIT MEETING ATAS LAPORAN KEUANGAN 2022**



Sumber gambar :

<https://kumparan.com/lapas-pemuda-plantungan-kemenkumham/kemenkumham-jateng-bersama-bpk-ri-gelar-exit-meeting-atas-laporan-keuangan-2022-1zmTwn0K06T/full>

Isi Berita :

SEMARANG - Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI menggelar Exit Meeting atas laporan keuangan tahun 2022, Jumat (03/02).

Berlangsung di Aula Kresna Basudewa, Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah, DR. A. Yuspahrudin, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Pemasarakatan, Supriyanto, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar.

Untuk diketahui Tim BPK sendiri yang terdiri dari 2 Tim telah melaksanakan Pemeriksaan mulai tanggal 30 Januari hingga 03 Februari 2023 pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Dalam paparannya, Pengendali Teknis I BPK RI, Joni Agung Priyanto, menyampaikan dari hasil pemeriksaan BPK RI di Kanwil Jawa Tengah tidak ditemukan penyimpangan yang substansial pada Laporan Keuangan Tahun 2022.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah, Dr. Yuspahrudin, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas review yang telah dilakukan oleh BPK RI.

Dalam kesempatan ini pula Yuspahrudin berharap dengan pemeriksaan BPK yang telah usai dapat menjadi pemantik semangat seluruh jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah serta beberapa Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng.

Sumber Berita:

1. <https://kumparan.com/lapas-pemuda-plantungan-kemenkumham/kemenkumham-jateng-bersama-bpk-ri-gelar-exit-meeting-atas-laporan-keuangan-2022-1zmTwn0K06T/full>, Kemenkumham Jateng Bersama BPK Gelar Exit Meeting atas Laporan Keuangan 2022, tanggal 06 Februari 2023.
2. <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7865-kemenkumham-jateng-bersama-bpk-ri-gelar-exit-meeting-atas-laporan-keuangan-tahun-2022>, Kemenkumham Jateng Bersama BPK RI Gelar Exit Meeting atas Laporan Keuangan Tahun 2022, Tanggal 06 Februari 2023.

Catatan Berita:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab mengelola keuangan negara. Berdasarkan UUD 1945, BPK bertugas untuk memeriksa, mengelola, dan bertanggung jawab keuangan negara bebas dan mandiri.
2. Tugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang-undang di bidang keuangan negara. Ada 3 UU yang mengatur yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.
3. Tugas BPK berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006:

- a. Tugas BPK adalah mengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Lembaga Negara seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, dan badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - b. Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara berdasarkan Undang-Undang.
 - c. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab, BPK melakukan pembahasan dan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara
 - e. Dalam pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, dan laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan oleh BPK lalu dipublikasikan
 - f. Hasil pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan ke DPD, DPR, DPRD. Hasil pemeriksaan tertulis diserahkan kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Walikota
 - g. Apabila pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK lalu melaporkan hal tersebut pada instansi yang berwenang sesuai peraturan UU. Laporan paling lama 1 bulan sejak diketahui unsur pidana.
4. Dalam artikel diatas, BPK telah melakukan tugasnya yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Kemenkumham kanwil Jawa Tengah dan BPK melakukan pembahasan dan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.